

# Kenapa Isu PKI Muncul

ketika Pemerintah sedang Mengebut Pembangunan dan Penegakan Hukum?

<https://seword.com/politik/kenapa-isu-pki-muncul-ketika-pemerintah-sedang-mengebut-pembangunan-dan-penegakan-hukum/>

BY MORA SIFUDAN ON SEPTEMBER 22, 2017 POLITIK

Miris memang menyaksikan kemunculan isu PKI ketika pemerintah sedang kerja keras mewujudkan pembangunan di seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta ketika maraknya penegakan hukum terhadap oknum-oknum pengacau seperti koruptor, Saracen, dan radikalisme. Seolah ada pihak-pihak yang sengaja menghambat kemajuan bangsa dan tegaknya hukum di negeri ini.

## Fenomena PKI

Fenomena bangkitnya PKI sejatinya sudah bergulir sejak tumbangya Orde Baru. Mereka yang merasa korban pembantaian ingin mendapatkan hak mereka sebagai warga negara. Mereka ingin kejelasan status sebagai korban atau pengkhianat, sebab mereka tidak pernah diproses hukum. Mereka tidak pernah dibuktikan bersalah. Mereka siap menerima apa pun keputusan hukum terhadap mereka asalkan ada proses yang dilakukan secara adil dan pasti.

Apakah pencarian keadilan, kepastian dan kejelasan status hukum itu bisa kita sebut sebagai fenomena bangkitnya PKI? Saya kira tidak segampang itu. Sebab siapa pun warga negara berhak mendapatkan keadilan di Indonesia ini. Keadilan adalah amanat Pancasila dan UUD 1945, termasuk kepada mereka yang dicap sebagai PKI. Tidak ada yang urgen soal PKI, tidak pula ada ciri kebangkitan PKI. Yang ada adalah mereka yang dihukum tanpa proses peradilan sedang menuntut keadilan. Kita sudah sepakat bahwa PKI tidak ada ruang sebutir debu pun di NKRI, jadi tidak akan bangkit lagi. Kalau begitu kenapa muncul isu PKI?

## **Pertama: Pengalihan isu atas kasus Saracen**

Berdasarkan penyelidikan kepolisian, ada nama-nama besar yang terkait dengan kasus Saracen. Kemungkinan besar, mereka adalah pengguna jasa Saracen untuk menumbangkan lawan-lawan politiknya. Nama yang sudah terkenal adalah Asma Dewi, melalui bukti foto-foto, yang diketahui simpatisan pasangan Anies-Sandi pada Pilkada DKI yang lalu. Tetapi pihak Anies-Sandi membantah peran serta Asma-Dewi karena tidak masuk dalam struktur tim pemenang Anies-Sandi.

Siapa pun mereka, yang terkait dengan Saracen, entah terkait langsung atau tidak dengan suatu partai, baik partai pendukung pemerintahan maupun kubu oposisi, kasus ini akan menjatuhkan mereka sampai ke titik nadir dunia perpolitikan Indonesia. Mereka akan diadili secara massal di dunia maya dan akan merambat ke dunia nyata. Rakyat akan mencari bukti-bukti yang menunjukkan siapa terkait dengan partai mana. Sebab media sosial itu kejam. Dapat dipastikan partai terkait akan tumbang tanpa perlawanan di beberapa Pemilu yang akan datang.

Jadi isu PKI adalah isu yang sangat seksi untuk dimainkan. Sekurang-kurangnya, isu PKI akan mengalihkan perhatian publik. Sebab sering kali publik lebih tertarik dengan isu baru dari pada isu lama, meskipun isu lama itu lebih menarik dan penting.

#### **Kedua: Pengalihan isu atas kasus pembakaran sekolah dan jatuhnya nama baik Gerindra**

Bagian ini terkait langsung dengan Partai Gerindra, yang salah satu kadernya melakukan pembakaran sekolah-sekolah demi menarik perhatian pemerintah daerah. Nama baik Gerindra seperti dijungkalkan sampai ke dasar jurang yang paling dalam.

Kasus ini digadang-gadang membuat junjungan Partai Gerindra, Prabowo Subianto, marah besar. Apalagi warganet menghubungkan tindakan anggota DPRD dari fraksi Gerindra dengan strategi politik Prabowo yang mengambil keuntungan dari kekacauan yang sedang terjadi. Dalam beberapa hari saja, kasus itu menjadi topik yang tiada hentinya di dunia maya.

Sejatinya Prabowo sudah melakukan manuver pada momentum tragedi kemanusiaan atas etnis Rohingya. Tetapi sayang, alih-alih mendongkrak nama baik partai malahan semakin menjatuhkan nama baik partai sekaligus ketuanya. Menyusul kemudian komentar Fadli Zon terkait Rohingya, yang mengusulkan agar Presiden Jokowi langsung ikut menyerahkan bantuan kemanusiaan ke Rakhin, ikut andil menjatuhkan nama Gerindra.

Apa hubungannya dengan isu PKI. FPI, sejak Pemilu 2014 sampai Pilkada DKI, sangat dekat dengan Gerindra dan PKS. Bukan kebetulan kalau peristiwa kepung gedung LBH lebih banyak dimotori oleh FPI dan yang secingkrangan dengannya. Minimal, perhatian publik dialihkan ke isu PKI daripada meluluh lantakkan nama baik Gerindra. Masuk akal? Sangat masuk akal.

#### **Ketiga: Pengalihan isu bobroknnya penilaian publik terhadap DPR karena hak angket terhadap KPK**

Bagian ketiga ini bukanlah yang terutama, tetapi juga sangat penting. Sebab DPR gagal menjatuhkan kredibilitas KPK dalam memberantas korupsi. Manuver DPR melalui hak angketnya justru berbalik menyerang mereka.

Prestasi OTT KPK memaksa DPR gigit jari. Kasus-kasus korupsi para pejabat daerah dan instansi pemerintahan lainnya menempatkan KPK berada di atas angin. Sementara DPR justru semakin memperburuk citra mereka di mata publik.

Maka tidak heran terdapat oknum-oknum DPR ikut meramalkan isu kebangkitan PKI. Sebab secara tidak langsung akan menutupi atau menggantikan keburukan mereka dengan keburukan PKI. Sekali lagi, publik Indonesia sangat mudah terbuai fenomena kekinian, sekalipun itu tidak terlalu penting dan melupakan fenomena sebelumnya, meskipun itu sangat penting dan genting.

#### **Keempat: pengalihan isu kasus-kasus hukum 'orang-orang terkenal'**

Cukup banyak orang terkenal memiliki kasus. Sebut saja Rizieq Shihab dengan kasus pornografinya, yang membuatnya takut pulang ke Indonesia. Kabarnya dia mengemis ke Jokowi minta kasusnya dihentikan. Lagi-lagi, bukan kebetulan FPI, yang pimpinannya adalah Rizieq Shihab, sangat aktif mendengarkan isu kebangkitan PKI. Bahkan jauh sebelum kasus Rizieq, FPI sudah menggembar-gemborkan isu kebangkitan PKI. Apalagi setelah permintaan pimpinannya tidak dikabulkan Jokowi, minimal kasus itu dilupakan publik.

Lain lagi dengan kasus Setya Novanto dan oknum anggota DPR lainnya yang terkait kasus e-KTP. Nama baik DPR yang semakin memburuk setelah gagal menyerang KPK, harus dipulihkan atau minimal dilupakan. Maka isu PKI akan seperti angin segar bagi mereka, sebab mereka masih punya waktu untuk menyusun strategi baru untuk menghadapi kasus yang ada.

Sama juga dengan kasus kepala daerah dan pejabat di instansi lain, juga dengan kasus Hambalang yang tak pernah berhenti menghantui partai Demokrat. Isu PKI membuat mereka mendapatkan kesempatan untuk bernafas lega sejenak.

#### **Kelima: strategi menumbangkan Jokowi dan mengganggu kinerja pemerintah**

Dari kelima alasan yang ada, alasan kelima inilah alasan paling keji dan biadab. *Pertama*, tuduhan Jokowi pro PKI. Anda pasti masih ingat buku Jokowi *Undercover* karya Bambang Tri yang menuduh Jokowi memalsukan jati dirinya. Menurut buku itu, yang sudah ditarik dari peredaran, Jokowi adalah seorang PKI. Ini lebih kejam dari Sumanto sang kanibal.

Seolah tidak menyerah, di depan gedung LBH kemarin, para demonstran meneriakkan bahwa Jokowi pro PKI. Tak henti-hentinya mereka menuduh seorang presiden mendukung PKI. Entah apa dalam pikiran mereka yang busuk itu. Sementara di dalam gedung, aktivis meneriakkan Indonesia Darurat demokrasi. Yang di gedung masih masuk akal, sebab mereka yang sedang mencari keadilan, sehari sebelumnya dilarang mengadakan seminar.

Mungkin sekarang tidak terlalu terasa efek dari seruan Jokowi pro PKI, tetapi akan sangat mungkin berdentung sampai Pemilu 2019 nanti. Sudah terbukti di Pilkada DKI bahwa tuduhan mampu menjungkalkan Ahok dari takhtanya di DKI. Bukan tidak mungkin hal yang sama terjadi pada Jokowi, jika Anda dan saya tidak ikut ambil bagian dalam perjuangan Pemilu 2019 yang aman dan damai tanpa provokasi isu tak berdasar.

*Kedua*, menghambat laju pembangunan. Isu PKI secara tidak langsung memengaruhi laju pembangunan. Perhatian pemerintah menjadi terganggu. Setidaknya menambah pekerjaan dan kerugian negara atas tindakan main kepong ala orang-orang biadab ke gedung LBH. Pemerintah harus bekerja ekstra. Dan sayangnya pemerintah harus membuang tenaga pada hal yang tidak penting sama sekali.

## **Kesimpulan**

Isu PKI ini bukan isu kacang. Ini persoalan yang harus dihadapi. Kita, yang masih waras, tidak bisa tinggal diam dan menunggu. Siapa pun tidak menginginkan PKI bangkit. Tetapi juga kita tidak bisa tinggal diam jika isu kebangkitan PKI digunakan hanya untuk menjatuhkan lawan politik. Ini tidak baik.

Jangan pula menganggap isu ini akan hilang dengan sendirinya. Bahkan menjelang Pemilu 2019, isu ini akan semakin marak. Selain itu, yang sangat urgen, kita tidak mungkin membiarkan isu PKI mengalihkan perhatian dari kelima hal yang saya sebutkan di atas, pasti masih lebih dari lima itu.

Pada akhirnya kita tidak ingin bangsa kita diaduk-aduk dengan isu murahan dan kebohongan. Bahwa PKI tak diberi ruang sedikit pun sudah tertulis di UU; oknum Partai Gerindra tersangka pembakaran 7 sekolah adalah fakta; kasus Saracen segera dituntaskan adalah keharusan; kasus-kasus lain segera diselesaikan; kita tidak membiarkan pengacau mengganggu pemerintah adalah kewajiban. Tidak semestinya isu PKI digunakan demi agenda dan kepentingan pribadi maupun kelompok.

Salam dari rakyat jelata

